

Lambannya birokrasi

Kasus untuk kuliah Patologi Administrasi Negara

Oleh: *Samodra Wibawa*

[<http://samodra.staff.ugm.ac.id/>, 5 Desember 2015]

Ini adalah contoh lambannya proses pembuatan keputusan di dalam organisasi pemerintah:

1. Maret tanggal 20 Rektor Universitas Negeri A meminta X (dosen dari Univ. Negeri B) untuk membantu pekerjaan di universitasnya. X bersedia, dan hari itu juga Rektor A membuat surat kepada Rektor B.
2. Rektor B lalu bertanya kepada Dekan, dan Dekan bertanya kepada Ketua Jurusan.
3. April 06 Ketua Jurusan menyetujui/mengijinkan.
4. April 09 Dekan mengirimkan persetujuan kepada Rektor.
5. Mei 25 Rektor A menyusulkan surat, bahwa X diminta untuk bertugas membantunya mulai 1 Juni.
6. Mei 28 Rektor B memintakan ijin kepada Sekjen Kementerian.
7. Agustus 24 Kepala Biro SDM Kementerian (an. Sekjen) menyurati Kepala Biro Kepegawaian agar memproses ijin penugasan ini.
8. November 27 Rektor A meminta X untuk bekerja mulai Desember, dan akan dilantik pada awal Januari.
9. Desember 02 si X menerima SK penugasan tersebut, ditandatangani oleh Sekjen an. Menteri tanggal 31 Agustus, yang menyatakan bahwa X ditugaskan di Univ A sejak 1 Juni.

Butuh waktu 8,5 bulan untuk memindahkan seorang pegawai satu tempat ke tempat lain....!
Dan ybs. disuruh bekerja di tempat yang baru sejak 6 bulan sebelum dia menerima surat itu – saat mana dia masih bekerja di tempat lama...! (Bacalah dengan seksama!) Butuh waktu 3 bulan untuk mengirimkan surat dari Kementerian kepada dosen!

Indonesia heiiiiibatt...!!!!

Bagaimana cara mengubah kondisi tersebut, sehingga kelak perpindahan tugas seseorang dapat selesai dalam satu hari saja? Ingat: MenPAN sudah ada sejak 1970-an, rasionalisasi birokrasi sudah dilakukan sejak 1945, negara modern Indonesia sudah dirintis sejak 1810-an.

*